

**PENERAPAN PSAK NO.70 TENTANG AKUNTANSI ASET DAN  
LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK PADA LAPORAN KEUANGAN  
PERUSAHAAN  
(STUDI KASUS PADA PT. X dan CV. Y)**

Disusun Oleh  
**Janet Erica Topaa**  
NIM. 135020301111073

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Derajat Sarjana Ekonomi*



**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2017**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	vi
LAMPIRAN .....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK .....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT.....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah .....	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 <i>Tax Amnesty</i> .....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Sejarah <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Definisi <i>Tax Amnesty</i> .....	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Tujuan <i>Tax Amnesty</i> .....	Error! Bookmark not defined.
2.2.4 Subjek dan Objek <i>Tax Amnesty</i> .....	Error! Bookmark not defined.
2.2.5 Fasilitas Pengampunan Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.6 Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan ....	Error! Bookmark not defined.
2.2.7 Deklarasi dan Repatriasi Pajak .....	Error! Bookmark not defined.

2.2.8 Pelaksanaan Tax Amnesty di Beberapa Negara ..... Error! Bookmark not defined.

2.3 Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak Error! Bookmark not defined.

2.4. Standar Akuntansi Keuangan .....Error! Bookmark not defined.

2.5 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan Publik. Error! Bookmark not defined.

2.6 Penyajian Laporan Keuangan.....Error! Bookmark not defined.

2.7 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 70..... Error! Bookmark not defined.

2.7.1 Kebijakan Akuntansi PSAK Nomor 70 .....Error! Bookmark not defined.

2.7.2 Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK Nomor 70... Error! Bookmark not defined.

2.7.3 Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan PSAK Nomor 70.....Error! Bookmark not defined.

2.8. Perseroan Terbatas (PT) .....Error! Bookmark not defined.

2.8.1 Definisi Perseroan Terbatas (PT) .....Error! Bookmark not defined.

2.8.2 Kriteria Perseroan Terbatas (PT) .....Error! Bookmark not defined.

2.9. *Commanditaire Vennootschap* (CV).....Error! Bookmark not defined.

2.9.1 Definisi *Commanditaire Vennootschap* (CV)....Error! Bookmark not defined.

2.9.2 Kriteria *Commanditaire Vennootschap* (CV)...Error! Bookmark not defined.

2.10 Penelitian Terdahulu .....Error! Bookmark not defined.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....Error! Bookmark not defined.

3.2. Objek Penelitian.....Error! Bookmark not defined.

3.3. Sumber Data.....Error! Bookmark not defined.

3.4. Metode Pengumpulan Data.....Error! Bookmark not defined.

3.5. Metode Analisis Data.....Error! Bookmark not defined.

#### **BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Usaha .....Error! Bookmark not defined.

4.1.1. Sejarah PT.X .....Error! Bookmark not defined.

4.1.2 Kegiatan Operasional PT.X .....Error! Bookmark not defined.

4.1.3. Sejarah CV. Y .....Error! Bookmark not defined.

4.1.4 Kegiatan Operasional CV. Y .....Error! Bookmark not defined.

4.2 Kebijakan Akuntansi pada PT.X dan CV.Y .....Error! Bookmark not defined.

4.3 Perbedaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 dengan PSAK Nomor 70 dalam Pencatatan.....Error! Bookmark not defined.

4.4. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial PT dan CV (secara umum) ....Error! Bookmark not defined.

4.5. Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK 70 pada PT.X dan CV.Y .....Error! Bookmark not defined.

#### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....Error! Bookmark not defined.

5.2 Keterbatasan Penelitian .....Error! Bookmark not defined.

5.3 Saran .....Error! Bookmark not defined.

**DAFTAR PUSTAKA..... 62**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dalam sosialisasinya mengenai amnesti pajak (2016) menyampaikan bahwa latar belakang amnesti pajak dikarenakan adanya moderasi pertumbuhan ekonomi global, perekonomian Amerika yang belum stabil, perlambatan pertumbuhan Tiongkok, ketidakpastian kebijakan moneter, dan harga komoditas yang menurun memberi dampak bagi perlambatan ekonomi di Indonesia, defisit neraca perdagangan, penurunan laju pertumbuhan sektor industri atau manufaktur, dan *infrastructure gap* yang masih tinggi. Akibat dari kondisi tersebut, di Indonesia terjadi peningkatan pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mencari cara untuk menemukan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satunya adalah dengan mencari sumber investasi dari Luar Negeri dan mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak).

Jika dilihat dari sisi pajak, dengan adanya *tax amnesty* maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN Indonesia lebih *sustainable*, sehingga mampu membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, jika dilihat dari sisi lain, dengan kebijakan *amnesty* ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro di Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan *tax*

*amnesty* didukung oleh adanya transparansi keuangan global. Hal tersebut diperuntukkan memperkecil kemungkinan Wajib Pajak menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Republik Indonesia. Hal ini juga merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, serta meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Kebijakan *tax amnesty* diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan, didukung semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak. Dengan kata lain kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek pajak. Subjek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi objek pajak berupa penambahan jumlah Wajib Pajak.

Menurut penelitian terdahulu dari jurnal Urip Santoso dan Justina M.Setiawan (2009), pada tahun 1984 pemerintah Indonesia pernah melakukan kebijakan *tax amnesty* di era Orde Baru. Namun dalam implementasinya, kebijakan tersebut dinilai tidak terlalu sukses karena tidak didasarkan pada payung hukum Undang-Undang yang jelas. Efektivitas pengampunan pajak dapat dilihat ketika pada tahun 1986 ditemukan bukti bahwa penerapan *tax amnesty* di beberapa negara bagian Amerika Serikat selama empat tahun sebelumnya, mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Pada tahun 2016, pemerintah berhasil mengeluarkan payung hukum yang jelas untuk kebijakan *tax amnesty* tersebut, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang



Pengampunan Pajak, arti *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kebijakan *tax amnesty* menetapkan tarif tebusan yang cukup kompetitif khususnya pada 3 bulan pertama sejak berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak yakni 2% (periode I), 3% (periode II), dan 5% (periode 3) untuk Wajib Pajak yang mendeklarasikan harta sekaligus mengiventasikan harta minimal 3 tahun di dalam negeri.

Kebijakan *tax amnesty* sangat di apresiasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 70 tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak sebagai bentuk dukungan atas kebijakan amnesti pajak. PSAK Nomor 70 tersebut memberikan panduan bagi Wajib Pajak untuk menyusun pelaporannya pasca pemberlakuan Undang-Undang Amnesti Pajak agar terhindar dari berbagai kesalahan akuntansi dan pelaporan keuangan yang mungkin timbul di kemudian hari. Menurut PSAK Nomor 70, aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak (paragraf 10), sedangkan liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak (paragraf 11). Entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas (paragraf 12), dimana jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun di reklasifikasi ke saldo laba.



Berdasarkan uraian latar belakang mengenai penurunan laju pertumbuhan di sektor industri, dimana dalam hal ini sektor industri minyak bumi sedang mengalami penurunan nilai akibat banyaknya eksploitasi, padahal penghasilan pajak di Indonesia sangat berpengaruh dari sektor tersebut dan menurut Direktur Utama Semen Indonesia, Rizkan Chandra mengatakan bahwa *tax amnesty* memberikan dampak positif bagi produsen semen karena dengan *tax amnesty* yang akan menghasilkan dana repatriasi dari para pemilik modal, dipercaya bakal meningkatkan likuiditas perbankan dan melonggarkan suku bunga kredit, sehingga dapat meningkatkan penjualan semen untuk keperluan pembangunan properti. Oleh karena itu, penulis menjadikan PT.X dan CV.Y sebagai studi kasus dalam penelitian ini, karena PT. X merupakan perusahaan yang berkecimpung dalam aktivitas bisnis kimia dan produk minyak bumi, sedangkan CV. Y merupakan salah satu perusahaan yang menjadi distributor semen (semen curah), kedua perusahaan tersebut berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Hal ini menjadi motivasi peneliti untuk meneliti perbedaan metode pencatatan dan pelaporan keuangan terhadap PT.X dan CV.Y karena mengikuti *tax amnesty* sesuai dengan PSAK Nomor 70.

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian terdahulu maka judul penelitian yaitu **“Penerapan PSAK Nomor 70 Tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak Pada Laporan Keuangan Perusahaan (Studi kasus pada PT. X dan CV. Y)”**

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 70 pada laporan keuangan PT. X dan CV. Y?
2. Bagaimana perbandingan penyusunan laporan keuangan PT.X dan CV.Y berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 70?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 70 pada laporan keuangan PT. X dan CV. Y.
2. Untuk mengetahui perbandingan penyusunan laporan keuangan PT.X dan CV.Y berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 70.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan bukti empiris, terutama yang berkaitan dengan pengampunan pajak dan pernyataan standar akuntansi keuangan.

### 2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan mengenai pengampunan pajak dan di bidang akuntansi mengenai pernyataan standar akuntansi keuangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dikutip oleh Mardiasmo, 2011 : 11), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu iuran atau kontribusi rakyat kepada negara, dipugut berdasarkan undang-undang, tidak ada kontraprestasi secara langsung, diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran negara secara umum untuk kesejahteraan rakyat.

#### 2.2 *Tax Amnesty*

##### 2.2.1 Sejarah *Tax Amnesty* di Indonesia

Menurut penelitian terdahulu dari jurnal Urip Santoso dan Justina M.Setiawan (2009) dengan judul “Tax Amnesty dan Pelaksanaannya di Beberapa

Negara : Perspektif bagi Pebisnis Indonesia”, Indonesia pernah melakukan *tax amnesty* dua kali yaitu tahun 1965 dan tahun 1984 berdasarkan Kepres Nomor 26 tahun 1984 tentang *Tax Amnesty* sebagai pelengkap Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang KUP, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang PPh dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPn BM. Dari kedua program *tax amnesty* ini tidak terdapat data yang lengkap dana yang berhasil dihimpun, tetapi jika dilihat maraknya penyelundupan pajak di Indonesia dapat dikatakan bahwa kedua program *tax amnesty* tersebut tidak berhasil meningkatkan basis pajak. Adanya tuntutan dunia usaha agar pemerintah memberlakukan kebijakan *tax amnesty*, secara parsial telah diakomodasi dalam pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2008. Pasal 37A telah mengakomodasi *tax amnesty* bagi Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT PPh sebelum tahun 2007, berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak. Bagi Wajib Pajak pribadi yang secara sukarela mendaftar NPWP paling lama 1 tahun setelah berlakunya Undang-undang diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun sebelum diperoleh NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan kecuali keterangan dalam SPT tidak benar. Program ini sering disebut Kebijakan *Sunset Policy*. *Sunset Policy* merupakan kebijakan *soft amnesty* yang meniadakan/menghapuskan sanksi administrasi akibat penyampaian SPT PPh tahun-tahun sebelumnya maupun pembetulan SPT PPh tahun 2006 dan sebelumnya yang mengakibatkan kurang bayar. Kebijakan *sunset policy* ini telah memenuhi unsur spesifikasi kebijakan *tax amnesty* yaitu:

1. *Eligibility* dimana Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang berhak mengikuti program ini adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. *Coverage* yaitu PPh pasal 29, PPh pasal 4 ayat 2, dan pasal 15 yang dibayar sendiri.
3. *Incentives* dimana Wajib Pajak dibebaskan dari sanksi administrasi berupa bunga, tidak akan dilakukan pemeriksaan, jika dilakukan pembetulan maka pemeriksaan akan dihentikan, dan SPT Pembetulan tidak akan digunakan untuk penetapan pajak lainnya.
4. *Duration* untuk Wajib Pajak kategori A dengan masa penyampaian SPT maksimal 31 Maret 2009, dan untuk Wajib Pajak kategori B dengan masa penyampaian pembetulan SPT mulai 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.

*Sunset policy* yang ditawarkan dengan maksud untuk memulai keterbukaan melaksanakan kewajiban kenegaraan perpajakan dan penegakan *law enforcement* pasca *tax amnesty*, dapat dilihat dalam KUP baru bahwa DJP diberi wewenang mengumpulkan data dan informasi secara berkesinambungan dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain baik pemerintah maupun swasta. Dari data ini memungkinkan DJP mendeteksi ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan. WP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak memanfaatkan *Sunset Policy*, akan menghadapi risiko dikenakan sanksi perpajakan. Di tahun 2016, pemerintah mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* dengan payung hukum yang lebih jelas dan tegas untuk dilaksanakan oleh semua Wajib Pajak.

### 2.2.2 Definisi *Tax Amnesty*

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Beberapa tipe *tax amnesty* menurut Sawyer (2006 : 2) yaitu :

- a. *Filling Amnesty* : pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT, pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi SPT.
- b. *Record-keeping Amnesty* : memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan dimasa lalu, pengampunan diberikan jika Wajib Pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.
- c. *Revision Amnesty* : merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT dimasa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus



dibayar) dan membayar pajak yang hilang (missing) atau belum dibayar (outstanding).

- d. *Investigation Amnesty* : pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan (*amnesty fee*) yang harus dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (*laundering amnesty*).
- e. *Prosecution Amnesty* : pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

### 2.2.3 Tujuan *Tax Amnesty*

Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 pasal 2 tentang asas dan tujuan pengampunan pajak.

*Tax amnesty* bertujuan untuk:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.



- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

#### **2.2.4 Subjek dan Objek *Tax Amnesty***

Undang-Undang No 11 Tahun 2016 menyatakan bahwa subjek dan objek pengampunan pajak meliputi :

1. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
2. Pengampunan pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
3. Dikecualikan dari setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak, yaitu Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan atau menjalani hukuman pidana atas tindakan pidana di bidang Perpajakan.
4. Pengampunan Pajak meliputi pengampunan pajak atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
5. Kewajiban perpajakan terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 2.2.5 Fasilitas Pengampunan Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 fasilitas pengampunan pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan.
- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak.
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan.

### 2.2.6 Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan

Undang-Undang No 11 Tahun 2016 mengungkapkan tarif dan cara menghitung uang tebusan yaitu:

- a. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau harta yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan di dalam wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak dialihkan sebesar:

1. 2% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku.
  2. 3% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
  3. 5% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- b. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah sebesar :
1. 4% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku.
  2. 6% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
  3. 10% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai tanggal 31 Maret 2017
- c. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,- pada tahun pajak terakhir adalah sebesar :
1. 0,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,- dalam Surat Pernyataan
  2. 2% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp.10.000.000.000,- dalam Surat Pernyataan untuk periode

penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017

### **2.2.7 Deklarasi dan Repatriasi Pajak**

Setiap Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak, akan mendeklarasikan hartanya dan mengakuinya juga di dalam laporan keuangan perusahaan (jika Wajib Pajak adalah sebuah perusahaan). Deklarasi harta berarti mengakui kepemilikan atas seluruh harta di dalam negeri yang sebelumnya disembunyikan atau tidak dilaporkan dalam laporan perpajakan. Sedangkan repatriasi adalah proses pengembalian akumulasi penghasilan berupa aset atau harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dalam pasalnya yang ke 13 ayat 2, menyatakan bahwa bagi Wajib Pajak yang bermaksud mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Wajib Pajak harus mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah NKRI melalui Bank Persepsi dan menginvestasikan harta tambahan dimaksud paling singkat 3 tahun dan melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan tersebut, dimana surat pernyataan memuat paling sedikit informasi mengenai identitas Wajib Pajak, Harta Utang, nilai Harta bersih, dan penghitungan Uang Tebusan. Selain itu, Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan

mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI paling singkat selama 3 tahun sejak harta dialihkan. Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, batas waktu pelaporan ini adalah bersamaan dengan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dalam pasalnya yang ke 13 ayat 5, juga disebutkan bahwa bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah NKRI, Wajib Pajak tidak dibolehkan mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan ke luar wilayah NKRI paling singkat 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan, dan harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan yang berada di dalam wilayah NKRI.

#### **2.2.8 Pelaksanaan Tax Amnesty di Beberapa Negara**

Pelaksanaan *tax amnesty* atau pengampunan pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia. Jauh sebelum pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan tersebut, ada beberapa Negara di dunia yang sudah melaksanakan program *tax amnesty*. Dalam penelitian ini diambil beberapa contoh Negara yang sudah melakukan *tax amnesty* berdasarkan penelitian terdahulu dari jurnal Urip Santoso dan Justina M.Setiawan (2009) dengan judul “Tax Amnesty dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara : Perspektif bagi Pebisnis Indonesia”. Berikut contoh beberapa Negara yang sudah melaksanakan *tax amnesty*, yaitu :

a. Afrika Selatan

Pada Februari 2003, Afrika Selatan telah melaksanakan *tax amnesty* yang dikaitkan dengan sistem pengawasan devisa, penduduk Afrika Selatan dilarang mentransfer devisa ke luar negeri di atas 750.000 Rand atau sekitar Rp. 1.250.000.000,-. Harta yang berada di luar negeri bilamana dibawa ke dalam negeri dan dimohonkan *amnesty* akan dikenakan tarif diskon 50%, sedangkan bila harta tersebut tetap berada di luar negeri akan dikenakan tarif tambahan 2%. Harta yang berasal dari korupsi, kegiatan kriminal lainnya tidak akan mendapat fasilitas pengampunan. Harta dari penghasilan dan disimpan di dalam negeri yang belum dilaporkan di SPT dan pajaknya belum dibayar juga tidak akan mendapat fasilitas pengampunan. Bila harta ini dilaporkan, fasilitas *amnesty* hanya berupa penghapusan denda 200% dan kelonggaran boleh mencicil pokok pajaknya. Lebih dari US\$ 7,6 miliar diperoleh dari program *tax amnesty* atas harta yang belum diungkapkan oleh Wajib Pajak. Menurut Menteri Keuangan Afrika Selatan waktu itu, Jabulani Moleketi, perkiraan penerimaan pengontrolan devisa dapat meningkat 2,3 miliar Rand dari 35.198 aplikasi permohonan pengampunan, aplikasi yang masuk pada bulan Februari 2003 total sebanyak 43.000 dan diberlakukan untuk satu tahun. Skema yang ditawarkan agar orang pribadi mengungkapkan harta yang belum dilaporkan, tanpa sanksi, hanya membayar penalty 5% dari jumlah yang dibawa kembali.



b. Irlandia

Pemerintah Irlandia telah menjalankan program *tax amnesty* dan menjadi salah satu negara yang paling berhasil dalam menjalankan program tersebut. Pada tahun 1988, pemerintah Irlandia mengumumkan usulan tenggat waktu sepuluh bulan pada Wajib Pajak nakal untuk membayar kewajiban tanpa ancaman sanksi denda dan bunga atau tuntutan. Serangkaian langkah pendukungnya adalah menambah jumlah pemeriksa pajak dengan tugas menegakkan pemungutan pajak, mengumumkan daftar hitam para pembayar pajak di surat-surat kabar nasional. Di akhir periode waktu pengampunan, memberlakukan system perpajakan baru terhitung mulai tanggal berakhirnya masa *tax amnesty*, tarif denda dan bunga naik bagi Wajib Pajak yang nakal, menambah kewenangan para penyidik untuk menyita barang serta aktiva lainnya dan membekukan rekening bank tersangka penyelundup pajak.

Saat program ini dilaksanakan, pemerintah Irlandia mendapatkan sekitar \$750 juta, dan dapat menurunkan kebutuhan dana pinjaman yang pada tahun 1987 sebesar 10% menjadi sekitar 3,4% dari PDB 1988, jumlah ini jauh melebihi target saat program ini diperkenalkan. Irlandia sebelumnya tidak pernah menempuh kebijakan *tax amnesty* dan program ini merupakan yang pertama dan terakhir bagi wajib pajak, sehingga kemungkinan menghambat program berikutnya karena tarif tidak diturunkan, dan di Eropa merupakan tarif tertinggi sehingga dapat meningkatkan keinginan untuk menghindari pajak.



c. India

Di Negara India program *tax amnesty* telah ditawarkan selama dekade-dekade yang lalu yaitu tahun 1952, 1965, 1975, 1981, 1986, 1991 dan terakhir tahun 1997. Sejak tahun 1975 program *tax amnesty* frekuensinya semakin sering, yaitu lima atau enam tahun sekali, sehingga telah menjadi bagian iklim melemahnya penegakan peraturan pajak penghasilan, manifestasinya yaitu intensitas tuntutan hukum lebih rendah, kemudahan penyelesaian di luar pengadilan atas tunggakan pajak. Tahun 1981 diberlakukan *tax amnesty* yang unik, untuk masa sekitar tiga bulan, pemerintah menjual obligasi jatuh tempo 1991, bunga khusus (2% per tahun) dirancang khusus untuk menjaring penghasilan yang belum terjaring pajak. Orang yang memegang dana pasar gelap diperkenankan menggunakan dana untuk membeli obligasi tanpa ada pertanyaan darimana dana tersebut berasal, dibebaskan dari pajak kekayaan deposito dan pajak penghasilan atas bunga dan pokok. Partisipasi tahun 1981 kecil karena warga negara menganggap bahwa di masa mendatang akan ada program *tax amnesty* yang lebih menarik, dan program ini telah dianggap menghukum Wajib Pajak yang patuh karena tidak mendapat tawaran membeli obligasi. Pada tahun 1997 pemerintah India berhasil mendapatkan 100 milyar Rupee dari program *tax amnesty*. Program yang dilaksanakan pada tahun 1997 ini merupakan keberhasilan bagi pemerintah India, karena dapat menaikkan basis pajaknya di tengah inflasi yang terjadi saat itu dan pemerintah India menegaskan bahwa program ini merupakan *amnesty* yang terakhir.

### 2.3 Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak

Sehubungan dengan berakhirnya program Pengampunan Pajak dan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-20/PJ/2017 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak, pengawasan Wajib Pajak yang tidak mengikuti pengampunan pajak dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data dan/atau informasi internal maupun eksternal mengenai harta Wajib Pajak dalam basis data yang dimiliki oleh DJP, pengawasan dilakukan oleh *Account Representative* (AR) Seksi Waskon II/III/IV dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau oleh Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dalam hal belum terdapat AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Data yang dimaksudkan antara lain SPT Tahunan PPh, dan data dan/atau informasi internal yang sudah divalidasi dan disediakan oleh system informasi yang bersumber dari SPT Tahunan Wajib Pajak, alat keterangan, hasil kunjungan (*visit*), dan/atau keterangan dari pihak Instansi, analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDL), internet dan informasi lainnya. AR pelaksana akan menuangkan hasil penelitian dan penyandingan tersebut dalam Lembar Pengawasan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal No.20. Lembar pengawasan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan atau tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan Lembar Pengawasan diarsipkan. Kegiatan pemeriksaan untuk Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak sehubungan ditemukannya data atau informasi harta dari pemeriksaan maka hanya

repository.ub.ac.id

dapat dilakukan jika Surat Permintaan Penjelasan (SP2) untuk pemeriksaan tersebut diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2019.

Selain pengawasan terhadap Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak, pengawasan juga dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir, ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan selain ketidaksesuaian karena adanya perbedaan nilai, pelunasan uang tebusan dan Laporan Wajib Pajak. pengawasan dilakukan oleh *Account Representative* (AR) Seksi Waskon II/III/IV dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau oleh Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dalam hal belum terdapat AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Pengawasan dilakukan dengan meneliti dan menganalisis data sebagai berikut :

1. Surat Keterangan/Surat Pernyataan
2. Harta Wajib Pajak pada Laporan *Gateway*, laporan *Gateway* adalah laporan yang disampaikan *Gateway* (Bank, Manajer Investasi, atau Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pengalihan Harta Wajib Pajak dan/atau melakukan pengelolaan dan penempatan dana Wajib Pajak pada instrument investasi dalam rangka Pengampunan Pajak) kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pengelolaan Data Eksternal.
3. Harta Wajib Pajak pada Laporan Wajib Pajak
4. Harta, penghasilan, biaya, dan kompensasi yang dilaporkan Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh dan SPT Masa

5. Harta dan penghasilan Wajib Pajak pada data eksternal dan/atau data internal.

Dalam hal berdasarkan hasil pengujian dan pengawasan jika diketahui terdapat ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai harta, AR atau pelaksana membuat Lembar Pengawasan Wajib Pajak dalam rangka pengampunan pajak, dan jika diketahui terdapat kesesuaian data dan/atau informasi mengenai harta, AR atau pelaksana membuat Lembar Pengawasan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.20, dengan usulan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan Lembar Pengawasan diarsipkan.

#### **2.4. Standar Akuntansi Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Efektif 1 Januari 2015 yang berlaku di Indonesia secara garis besar akan konvergen dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014. Ada 3 cara melakukan proses konvergensi yaitu dengan :

1. Adaptasi yaitu dengan membuat standar akuntansi sendiri yang disesuaikan dengan IFRS.
2. Adopsi yaitu dengan mengambil dan memakai langsung standar dari IFRS.

3. Harmonisasi yaitu dengan membuat standar akuntansi sendiri yang tidak bertentangan dengan IFRS.

Standar akuntansi keuangan memuat konsep standar dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam lingkungan tertentu. Standar ini dapat diterapkan sepanjang masih relevan dengan keadaan perusahaan yang bersangkutan. Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam SAK yaitu :

1. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laba rugi yang dinyatakan dengan kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi.
2. Definisi elemen dan pos laporan keuangan
3. Pengukuran unsur laporan keuangan adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui setiap laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan laba rugi.
4. Pengungkapan atau penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan.

## **2.5 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan Publik**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP tersebut berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan. Penggunaan SAK ETAP ini adalah

ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Mulai dari tahun 2011, setiap entitas tanpa akuntabilitas publik diberikan pilihan apakah akan menggunakan PSAK umum atau SAK ETAP. Apabila pada tahun 2011 suatu entitas tanpa akuntabilitas publik telah menetapkan untuk menggunakan PSAK umum, maka entitas tersebut setelah tahun 2011 tidak boleh merevisi kebijakan akuntansinya dengan menggunakan SAK ETAP. Oleh karena adanya kebijakan tidak boleh merevisi menjadi SAK ETAP, maka tahun 2011 ini menjadi tahun yang sangat menentukan dan bersifat strategis bagi pengambilan keputusan mengenai Standar Akuntansi Keuangan yang akan digunakan.

IAI (2009:52) menyatakan dalam SAK ETAP mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan dengan ruang lingkup mengatur pengukuran dan pengakuan persediaan. Persediaan adalah aset yang memenuhi kriteria tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Terdapat 2 metode pencatatan persediaan, yaitu metode fisik (periodik) dan metode buku (perpetual). Penggunaan metode fisik mengharuskan adanya perhitungan persediaan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pada saat pembelian, akun yang didebitkan adalah pembelian bukan persediaan barang dagangan, maka persediaan barang dagangan tidak dapat diketahui



langsung dari saldo akun persediaan barang dagangan dibuku besar. Sedangkan dalam metode perpetual, setiap jenis persediaan dibuatkan rekening masing-masing yang terdiri atas pencatatan pembelian, penjualan, dan saldo persediaan. Dengan menggunakan metode perpetual, jumlah persediaan sewaktu-waktu dapat diketahui dengan melihat kolom saldo dalam rekening persediaan. Hal ini memudahkan perusahaan untuk mengawasi barang-barang dalam gudang juga penyusunan neraca dan laporan laba rugi (Effendi, 2014:218,219).

Ada tiga metode persediaan yang dapat diterima menurut GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*), yaitu FIFO (*First In First Out*), rata-rata tertimbang, dan LIFO (*Last In First Out*). Namun selaras dengan SAK ETAP, metode LIFO tidak diperbolehkan untuk digunakan. Dalam metode FIFO, harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli diakui sebagai harga pokok penjualan. Jadi, yang dimaksud disini bukan berarti unit atau fisik barang yang pertama dibeli yang pertama akan dijual, tetapi lebih berdasarkan kepada harga pokoknya. Nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang terakhir dibeli. Jika menggunakan metode rata-rata, harga pokok penjualan per unit dihitung berdasarkan rata-rata harga pokok per unit dari barang yang tersedia untuk dijual (Hery, 2014:97,98). Akan tetapi metode FIFO menghasilkan nilai persediaan akhir dan laba paling besar serta harga pokok penjualan paling kecil. Senada dengan itu, Heintz dan Parry dalam Abdullahi (2015) berpendapat, bahwa FIFO dapat meningkatkan pendapatan yang terlihat dalam laporan laba rugi ketika biaya persediaan yang lama lebih rendah dari biaya persediaan yang baru, harga pokok penjualan menjadi lebih kecil yang mana sebaliknya laba kotor meningkat.



## 2.6 Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Kieso dkk (2007 : 2) yang dialih bahasakan oleh Emil Salim, menyatakan bahwa “Laporan keuangan merupakan suatu pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi”. Menurut PSAK 1 (revisi 2009), “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” (paragraf 9). Berdasarkan pengertian laporan keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi mengenai informasi keuangan suatu perusahaan untuk pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan diharapkan disajikan secara layak, jelas dan lengkap yang mengungkapkan keadaan ekonomi perusahaan yang sesungguhnya. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas.

## 2.7 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 70

Dalam rangka mendukung program pemerintah melalui peningkatan penerimaan pajak serta sebagai bentuk tanggung jawab yang diamanahkan kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) selaku badan penyusun standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, maka pada tanggal 14 September 2016 DSAK IAI telah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 70 tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. Berdasarkan PSAK nomor 70, aset pengampunan pajak adalah aset yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Biaya perolehan aset pengampunan pajak adalah nilai aset

berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Sedangkan Liabilitas pengampunan pajak adalah liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Tujuan dari PSAK 70 adalah memberikan pengaturan perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dalam menentukan apakah entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya, entitas mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Entitas menerapkan PSAK 70, jika entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya. PSAK 70 juga dapat diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan sesuai definisi dalam Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), jika entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya. Entitas yang telah melakukan pengampunan pajak memiliki pengendalian investasi diperkenankan mengukur investasi anak dengan metode biaya sampai dengan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2017 dan setelahnya diharuskan mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai pada tanggal Surat Keterangan dan secara bersamaan juga menerapkan prosedur konsolidasi sesuai PSAK 65 yaitu Laporan Keuangan Konsolidasian, dengan pengukuran kembali dimulai setelah tanggal Surat Keterangan sampai 31 Desember 2017.

### **2.7.1 Kebijakan Akuntansi PSAK Nomor 70**

Berdasarkan PSAK 70 paragraf 6, pada saat diterbitkannya Surat Keterangan, entitas dalam laporan posisi keuangannya:

- (a) mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak jika pengakuan atas aset atau liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK;
- (b) tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas jika SAK tidak memperbolehkan pengakuan atas item tersebut; dan
- (c) mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK yang relevan.

## **2.7.2 Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK Nomor 70**

### **2.7.2.1 Pengakuan**

Dalam paragraf 9, entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK. Entitas tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas, jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut.

### **2.7.2.2 Pengukuran**

Pengukuran dibagi menjadi pengukuran saat pengakuan awal dan setelah pengakuan awal, semuanya diatur dalam pasal 10 sampai dengan pasal 17.

#### **1. Pengukuran Saat Pengakuan Awal**

- a. Aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak.
- b. Liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

c. Entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas.

d. Entitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode disampaikannya Surat Pernyataan.

## 2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada SAK yang relevan, antara lain:

- (a) Properti investasi, sesuai dengan PSAK 13: Properti Investasi
- (b) Persediaan, sesuai dengan PSAK 14: Persediaan
- (c) Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, sesuai dengan PSAK 15:

Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

- (d) Aset tetap, sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap
  - (e) Aset tak berwujud, sesuai dengan PSAK 19: Aset Tak berwujud
  - (f) Aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih yang timbul dari kombinasi bisnis, sesuai dengan PSAK 22: Kombinasi Bisnis
  - (g) Instrumen keuangan, sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan:
- Pengakuan dan Pengukuran

## 3. Penghentian Pengakuan

Dalam paragraf 18 disebutkan bahwa entitas menerapkan kriteria penghentian pengakuan atas masing-masing aset dan liabilitas

pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam SAK lain yang relevan untuk masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut

### **2.7.3 Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan PSAK Nomor 70**

#### **2.7.3.1 Penyajian**

Penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 70 diatur dalam paragraf 19, 20, dan 21 ,adalah sebagai berikut:

- a. Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan.
- b. Entitas mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak ke dalam pos aset dan liabilitas serupa ketika entitas mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak, dan memperoleh pengendalian atas *investee*.
- c. Entitas tidak melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak.

#### **2.7.3.2 Pengungkapan**

Dalam paragraf 22, entitas mengungkapkan, dalam laporan keuangannya, tanggal Surat Keterangan dan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan serta jumlah liabilitas pengampunan pajak. Entitas menggunakan pertimbangannya dalam mengungkapkan kebijakan dan estimasi akuntansi, serta rincian atas jumlah tercatat yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan andal sebagaimana diatur dalam pasal 23.

## **2.8. Perseroan Terbatas (PT)**

### **2.8.1 Definisi Perseroan Terbatas (PT)**

Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 1, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 2.

### **2.8.2 Kriteria Perseroan Terbatas (PT)**

Kriteria suatu badan usaha dapat disebut sebagai perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 32 ayat 1, 2, dan 3, adalah sebagai berikut :

- (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Serta diatur dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, sebagai berikut :

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 2 ayat 1 yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak badan dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, termasuk laba usaha, dividen, keuntungan karena penjualan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam hal ini yang menjadi salah satu objek penghasilan untuk perseroan terbatas adalah dividen, karena aset perusahaan pada perseroan



terbatas terbagi ke dalam saham-saham dimana pemilik perusahaan tidak lain adalah para pemilik saham tersebut. Pemilik akan mendapatkan keuntungan berupa dividen atas keuntungan yang diperoleh perusahaan. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan.

## **2.9. *Commanditaire Vennootschap* (CV)**

### **2.9.1 Definisi *Commanditaire Vennootschap* (CV)**

*Comamanditaire Venootschap* atau Persekutuan Komanditer adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Di dalam CV dikenal dua istilah sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu diam atau pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak menentukan arah kebijakan perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya menyertakan modal dalam persekutuan tersebut. *Comamanditaire Venootschap* (CV) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 19 sampai dengan pasal 21 tentang Persekutuan Komanditer, tentu juga tidak lupa KUHPerdara, sebagaimana konsep awalnya merupakan Persekutuan atas dasar Perjanjian.

### **2.9.2 Kriteria *Commanditaire Vennootschap* (CV)**

Kriteria suatu badan usaha dapat disebut sebagai *comamanditaire venootschap* berdasarkan KUHD pasal 19 sampai dengan pasal 21 tentang dasar hukum pendirian CV, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 19 : Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara

beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang. (KUHD. 16, 20, 22 dst.)

2. Pasal 20 : Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. (KUHD 19-21.) Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. (KUHD 17, 21, 32.) Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya. (KUHPerd. 1642 dst.)
3. Pasal 21 : Persero komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu. (KUHD 18).

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dengan demikian, menurut perpajakan, CV merupakan badan yang menjadi subjek pajak, meskipun secara hukum CV bukan merupakan badan hukum. Objek pajak bagi CV adalah dapat berupa laba usaha. Kekayaan atau aset usaha akan termasuk di dalam harta pribadi pendirinya dikarenakan CV bukan merupakan badan hukum. Oleh karena itu, pendiri CV baik sekutu aktif maupun pasif mendapatkan penghasilan atas usaha yang dijalankan, yaitu *prive* atau laba yang termasuk dalam objek pajak sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 pasal 4 huruf c.

## 2.10 Penelitian Terdahulu

Dalam membuat penelitian ini, penulis melakukan telaah pustaka untuk mencari bahan acuan yang mempunyai kaitan dengan objek yang penulis teliti agar penelitian menjadi lebih terarah. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lucia Nurmalia S. (2017)	Analisis Hubungan antara Persepsi <i>Tax Amnesty</i> dan Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi <i>Tax amnesty</i> dan persepsi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah berhubungan rendah,

			karena berada pada rentang 0,200 – 0,399 dengan arah positif. Jika persepsi <i>Tax amnesty</i> tinggi maka persepsi kepatuhan WPOP juga akan tinggi.
2.	Elizabeth Hilda Yuliani (2016)	Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Wilayah Kanwil DJP D.I.Yogyakarta)	Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran, hal ini terlihat dari presentase penambahan jumlah WPOP meningkat dengan jumlah yang kecil. Tetapi kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar setelah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak.

3.	Ronny Hendrawan (2011)	Analisis Penerapan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (RSUD Kota Semarang)	Hasil analisis kualitatif menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk 8 indikator yang digunakan, dengan demikian tidak ada perbedaan perhitungan antara laporan keuangan RSUD Kota Semarang dengan PSAK No.45.
4.	Ratih Septiana (2015)	Analisis Penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan Koperasi Bendosari (Studi Kasus pada KUD Bendosari Kepanjen Kidul Kota Blitar)	Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini diketahui bahwa Laporan Keuangan pada Koperasi Unit Desa Bendosari telah menerapkan SAK ETAP dengan baik, akan tetapi masih ada beberapa kekurangan dalam penerapannya, diantaranya tidak ada akun potongan pembelian dalam pembukuan keuangan KUD Bendosari, jangka waktu piutang dari piutang tak tertagih tidak dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.	Husnurrosyidah, Ulfa Nuraini (2016)	Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Bmt Se- Karisidenan Pati	Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-eks Karisidenan Pati. Hal ini disebabkan adanya keringanan denda perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan pajak.
6.	Ragimun (2015)	Analisis Implementasi Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) di Indonesia	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa <i>Tax amnesty</i> dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum yang jelas dalam pelaksanaannya. Salah satu kelemahan <i>tax amnesty</i> diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan & moral hazard karena sarana prasarana, serta implementasi <i>tax amnesty</i> dalam jangka pendek sebaiknya ditunda terlebih dahulu menunggu kesiapan berbagai perangkat dan piranti hukum yang melandasi pelaksanaan kebijakan ini.

7.	Stefanus Ariyanto, Kartika Wijaya (2011)	Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada PT Saptawira Adhitama Tour & Travel	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh dari mengimplementasikan SAK ETAP pada laporan keuangan perusahaan adalah nilai Saldo Laba perusahaan pada Neraca Awal penerapan SAK ETAP menjadi lebih tinggi dari sebelumnya; pendapatan usaha pada laporan laba rugi menjadi lebih rendah akibat adanya penerapan kewajiban secara akrual dapat menyebabkan munculnya pos Pendapatan Diterima Dimuka; serta adanya penyajian terpisah dari transaksi dengan pihak-pihak istimewa yang menimbulkan pos Piutang Hubungan Istimewa pada neraca perusahaan.
8.	Dahlia Hasan (2009)	Sunset Policy dan Implikasinya terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan di Daerah Istimewa Yogyakarta	Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Sunset Policy pada dasarnya berimplikasi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan di DIY dalam kurun waktu Januari-Oktober 2008. Namun



		demikian, kontribusi yang diberikan belum optimal karena masih sedikitnya jumlah wajib pajak yang menggunakan fasilitas tersebut, sehingga berimbas pada belum signifikannya peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan tahun 2008 dibanding penerimaan pajak penghasilan tahun 2007 di DIY.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak diteliti, metode yang sesuai dengan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011), penelitian bersifat kualitatif memiliki beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, menekankan pada proses, analisis data secara induktif, serta lebih menekankan pada makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat memperoleh informasi secara detail mengenai penerapan PSAK Nomor 70 pada PT.X dan CV.Y, sehingga peneliti bisa menghasilkan data deskriptif sebagai salah satu acuan dalam penelitian skripsi ini untuk membandingkan penerapan PSAK Nomor 70 pada kedua perusahaan tersebut.

#### 3.2. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2011), objek penelitian adalah “Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.” Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah laporan keuangan pada perusahaan PT. X dan CV.Y. Perusahaan ini dipilih karena kedua perusahaan tersebut sudah melakukan *tax amnesty* yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan untuk mengetahui perbedaan yang ada dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 70 *pasca tax amnesty*. Periode penelitian ini adalah

data dari laporan keuangan per 31 Desember 2015 - 31 Desember 2016 sesuai SAK yang berlaku di perusahaan dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterima oleh Wajib Pajak, dalam hal ini adalah PT.X dan CV.Y. Alasan dipilihnya data pada periode tersebut karena penerapan PSAK nomor 70 baru berlaku aktif di perusahaan mulai tanggal 1 Oktober 2016.

### 3.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010), sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai laporan audit *pasca tac amnesty* terhadap PT.X dan CV.Y dengan cara wawancara langsung kepada auditor bagi kedua perusahaan tersebut.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperlukan secara langsung meliputi dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2013). Data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan Perusahaan, serta penelitian terdahulu mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber data dari beberapa peraturan perpajakan terkait

pelaksanaan pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

#### 1. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2013) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam menggunakan metode ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan membawa instrument penelitian sebagai pedoman pertanyaan tentang hal-hal yang akan ditanyakan untuk mencari data mengenai laporan audit pasca *tax amnesty* untuk mengetahui perbedaan penyusunan laporan keuangan pasca *tax amnesty* yang sesuai dengan PSAK nomor 70. Wawancara dilakukan dengan auditor eksternal bagi kedua perusahaan, namun dalam hal ini narasumber tidak ingin namanya disebutkan di dalam penelitian ini.

#### 2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, arsip, majalah bahkan dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Laporan Audit PT.X dan CV.Y, Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

### 3.5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang ada. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah konsep dari Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti memilih beberapa dokumen dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan penelitian, menganalisis data tersebut dimulai dengan pengembangan beberapa pendapat ahli melalui teoritisasi.

#### 2. Penyajian Data

Miles dan Huberman (1984) membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan melalui teks yang bersifat naratif, yang didukung dengan tabel hasil analisis data.

### 3. Conclusion Drawing / Verification

Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal / interaktif dan hipotesis / teori. Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan 2 tahapan analisis data, yaitu reduksi dan penyajian data, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut bahwa ditemukannya perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan antara PT.X dan CV.Y. Hasil analisis ini dapat diverifikasi melalui triangulasi teknik pengumpulan data yang berasal dari wawancara dengan auditor bagi kedua perusahaan tersebut dan dokumentasi yang diambil dari beberapa dokumen yang ada di perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL dan PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Usaha

##### 4.1.1. Sejarah PT.X

PT. X merupakan sebuah perusahaan yang didirikan di Gresik pada tahun 1996. PT. X menjalankan perdagangan yang bergerak di lapangan penyaluran bahan bakar dengan mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). SPBU adalah lokasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM yang melayani konsumen secara eceran/ritel dan dikhususkan untuk kendaraan bermotor, atau depot BBM dengan kapasitas tangki timbun BBM yang terbatas. Di Indonesia, ada empat distributor BBM yang menjual produknya di SPBU, antara lain Pertamina (Indonesia), Shell (Belanda), Petronas (Malaysia), dan Total (Prancis). SPBU Pertamina menjual BBM Premium bersubsidi (RON 88), Pertamax (RON 92), Pertamax Plus (RON 95), solar, serta solar Pertamina DEX.

Berdasarkan data legalitas yang didapat peneliti dari perusahaan, PT. X memiliki perjanjian fidusia dengan salah satu bank pemerintah Indonesia yang dipergunakan sebagai tambah modal kerja usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Perjanjian tersebut termasuk dalam jenis berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dalam suatu Rekening Koran yang berjalan dengan *maximum Crediet Overeenkoms* (CO) tetap, tidak termasuk bunga, denda, provisi, ongkos-ongkos dan bea lainnya. Perjanjian ini diketahui dan ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris, Direktur Utama, dan Direktur PT. X yang menggabungkan diri masing-masing untuk mewakili hutang tersebut dan segala hutang yang akan



ditimbulkan karena persetujuan tersebut, sehingga berarti bahwa baik bersama-sama maupun salah seorang saja yang menanggung hutang.

#### 4.1.2 Kegiatan Operasional PT.X

Kegiatan operasional PT.X sebagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Kegiatan operasional SPBU pada umumnya terbagi menjadi tiga golongan yaitu:

1. SPBU COCO (*Corporate Owned Corporated Operated*), yaitu SPBU yang sepenuhnya dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dalam hal ini Pertamina Ritel.
2. SPBU CODO (*Corporate Owned Dealer Operated*), yaitu SPBU yang operasionalnya merupakan kerjasama antara Pertamina dengan dengan swasta mungkin dalam hal kepemilikan lahan ataupun lainnya.
3. SPBU DODO (*Dealer Owned Dealer Operated*), yaitu SPBU yang sepenuhnya di miliki swasta tapi membeli lisensi merk Pertamina.

Dalam hal ini, PT. X termasuk dalam golongan SPBU DODO (*Dealer Owned Dealer Operated*) yang bisa dilihat dari kode angka identitas SPBU yang biasa di tampilkan di papan, untuk SPBU COCO kode X.1, X menunjukan region pemasaran, 1 menunjukan kepemilikan atau pengelolaannya, sedangkan SPBU CODO kode X.3, dan SPBU DODO X.4

#### 4.1.3. Sejarah CV. Y

CV. Y merupakan sebuah perusahaan yang didirikan di Gresik pada tahun 1980, tepatnya berkedudukan di Kabupaten Gresik. CV. Y berusaha di bidang

industri dan perdagangan umum baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi (bertindak sebagai komisioner, grosir, agen/perwakilan, dan distributor/penyalur).

#### 4.1.4 Kegiatan Operasional CV. Y

Kegiatan operasional CV.Y adalah di bidang *wholesale* – perusahaan dagang besar jenis barang/jasa dagangan utama semen, dan sebagai distributor semen. Pengertian distributor secara lengkap adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung, dan distributor tersebut kemudian menjual produk tersebut ke pengecer atau pelanggan.

Ada beberapa hal yang menjadi tugas distributor, antara lain:

1. membeli barang dan jasa dari produsen atau pedagang yang lebih besar
2. mengklasifikasi barang atau memilahnya sesuai dengan jenis, ukuran, dan kualitasnya
3. memperkenalkan barang atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen, misalnya dengan reklame atau iklan.

Seorang distributor harus memiliki kriteria yang sesuai dari ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan. Baik mengenai kewajiban, hak, maupun sanksi terhadap pekerjaan tersebut telah diatur di dalam perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan distributor itu sendiri. Terdapat beberapa alasan perusahaan menggunakan distributor dalam menjalankan usahanya, yaitu:

1. Para produsen atau perusahaan kecil dengan sumber keuangan terbatas tidak mampu mengembangkan organisasi penjualan langsung.

2. Para distributor nampaknya lebih efektif dalam penjualan partai besar karena skala operasi mereka dengan pengecer dan keahlian khususnya.
3. Para pengusaha pabrik yang cukup model lebih senang menggunakan dana mereka untuk ekspansi daripada untuk melakukan kegiatan promosi.
4. Pengecer yang menjual banyak sering lebih senang membeli macam-macam barang dari seorang grosir daripada membeli langsung dari masing-masing pabriknya

#### 4.2 Kebijakan Akuntansi pada PT.X dan CV.Y

Tabel 4.1. Kebijakan Akuntansi PT.X dan CV.Y

No	Kebijakan Akuntansi	CV.Y	PT.X
1	Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan SAK ETAP</li> <li>• Laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung</li> </ul>	
2	Piutang Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disajikan dalam jumlah netto</li> <li>• Penghapusan piutang menggunakan metode cadangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disajikan dalam jumlah bruto</li> <li>• Tidak melakukan penyisihan piutang tidak tertagih</li> </ul>
3	Transaksi dengan Pihak yg mempunyai Hub.Istimewa	Mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain	
4	Persediaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan metode FIFO (First In First Out)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan metode HPP (Harga Pokok Penjualan)</li> </ul>
5	Aset Tetap & Penyusutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset tetap kecuali bangunan menggunakan metode Saldo Menurun Berganda :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset tetap kecuali bangunan menggunakan metode Saldo Menurun : 1. Bangunan = 5%</li> </ul>

		1. Bangunan = 5% 2. Kel. 1 = 50% x NB 3. Kel. 2 = 25% x NB	2. Kendaraan = 25% - 50% 3. Inventaris = 25% - 50%
6	Penjualan & Beban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan diakui saat penyerahan/penjualan barang</li> <li>• Beban diakui pada saat terjadinya (Accrual Basis)</li> </ul>	
7	Imbalan Kerja	Belum menerapkan SAK ETAP No.23	
8	Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Penghasilan menggunakan <i>Tax Payable Method</i> (metode utang pajak)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pph Final (sesuai UU No.36 tahun 2008)</li> </ul>

Sumber : data primer (diolah)

Dari tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa terdapat empat persamaan kebijakan akuntansi antara PT.X dengan CV.Y yaitu pertama, dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan sudah menetapkan SAK ETAP, laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Kedua, terdapat hubungan istimewa dengan pihak lain, yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor
2. Perusahaan asosiasi
3. Perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut

4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manager dan perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut
5. Perusahaan di mana kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan.

Ketiga, pendapatan diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli dan beban diakui saat terjadinya (accrual basis). Keempat, belum menerapkan SAK ETAP No.23 tentang imbalan kerja yang mengharuskan Bank untuk mengakui kewajiban jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan dan beban jika perusahaan menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Imbalan kerja ini mencakup upah, gaji, iuran jaminan social, imbalan pensiun, cuti tahunan, cuti sakit, cuti hari raya, pesangon pemutusan kontrak kerja, imbalan berbasis ekuitas, dll.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas juga terdapat empat perbedaan kebijakan akuntansi antara PT.X dengan CV.Y, yaitu pertama, piutang usaha pada PT.X disajikan dalam jumlah bruto dan perusahaan tidak melakukan penyisihan piutang tak tertagih, piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan

tertagih, sedangkan pada CV.Y piutang usaha disajikan dalam jumlah netto dan perusahaan pada dasarnya mengadakan penyisihan piutang untuk kemungkinan adanya piutang uang tidak dapat tertagih berdasarkan prosentase atas saldo piutang tanggal neraca, penghapusan piutang dengan menggunakan metode cadangan dan dibebankan sebagai beban operasional. Kedua, persediaan barang dagangan pada PT.X diakui sebesar nilai harga perolehan, perusahaan tidak mengadakan cadangan atas persediaan yang susut, persediaan yang susut dibebankan langsung ke harga pokok penjualan, sedangkan persediaan barang dagangan pada CV.Y dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out), penyisihan penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap persediaan pada akhir periode.

Ketiga, penyusutan aset tetap pada PT.X menggunakan metode saldo menurun selama masa manfaatnya, sedangkan pada CV.Y menggunakan metode saldo menurun berganda. Keempat, dari sisi perpajakan, PT.X telah melakukan kewajiban perpajakannya dan pelaporannya. Pajak yang dikenakan atas penghasilan sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 adalah final karena perusahaan menjual produk-produk tertentu menurut pajak, yaitu Premium, Solar, minyak tanah dan Elpiji. Berdasarkan hal tersebut perusahaan tidak mengakui aset dan kewajiban pajak tangguhan atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban dikarenakan dasar pengenaan pajak yang dilaporkan adalah nihil, sementara itu pada CV.Y pajak penghasilan diakui dengan metode hutang pajak (*tax payable method*) sesuai dengan penerapan SAK ETAP No.24. Dengan metode ini, pajak penghasilan



ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak untuk tahun tersebut (pajak kini).

#### **4.3 Perbedaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 dengan PSAK Nomor 70 dalam Pencatatan**

Sama seperti kebijakan akuntansi antara PT dengan CV yang memiliki perbedaan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 dan PSAK Nomor 70 juga memiliki beberapa perbedaan. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 selisih aset dan liabilitas dicatat dengan menggunakan pendekatan *Entity Theory* (aktiva = modal), sedangkan dalam PSAK Nomor 70 dicatat dengan menggunakan pendekatan *Proprietary Theory* (aktiva – kewajiban = modal). *Entity Theory* menganggap bahwa perusahaan memiliki eksistensi yang terpisah. Pemisahan ini terjadi pada kepentingan pemilik dan pemegang ekuitas yang lain. Pendiri dan pemilik perusahaan tidak perlu diidentifikasi dengan eksistensi perusahaan, sedangkan *Proprietary Theory* lebih mengedepankan asas kepemilikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, selisih aset dan liabilitas dicatat dalam saldo laba ditahan, karena saldo laba mencerminkan jumlah kumulatif kinerja entitas, serta aset dan liabilitas pengampunan pajak dianalogikan dengan kontribusi dari atau distribusi ke pemegang saham. Sedangkan dalam PSAK Nomor 70 dicatat dalam tambahan modal disetor, karena kenaikan atau penurunan aset dan liabilitas tersebut bukan merupakan penghasilan atau beban entitas selama periode tersebut, sehingga transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi ekuitas.



Bagi perusahaan PT dan CV akan ada perbedaan dalam pencatatan akun yang diikuti sertakan dalam tax amnesty. Menurut narasumber yaitu auditor dari PT.X dan CV.Y, beliau mengatakan bahwa dalam pencatatan selisih aset dan liabilitas setelah melaksanakan tax amnesty, untuk PT.X akan dicatat ke saldo laba ditahan karena pada jenis perusahaan perseroan terbatas ada pemegang saham sehingga ada pembagian dividen di tiap akhir periode. sedangkan untuk CV.Y akan dicatat ke tambahan modal disetor karena semua laba atau pembiayaan pada saat tahun berjalan akan langsung masuk ke modal.

#### **4.4. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial PT dan CV (secara umum)**

Pada dasarnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pengujian saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan suatu perusahaan. Dengan analisis tersebut, maka dapat membantu pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Jadi untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan tersebut perlu adanya laporan keuangan perusahaan.

Dalam penelitian ini, laporan keuangan menjadi hal utama yang harus diteliti dan didukung oleh hasil wawancara dan dokumentasi. Perusahaan berbentuk PT dan CV secara umum memiliki perlakuan akuntansi yang sama, hanya saja ada beberapa perbedaan yang nantinya akan berpengaruh di sisi pajak. Perbedaan yang signifikan antara PT dan CV jika dilihat dari modal dan saham perusahaan.

Pada perusahaan berbentuk PT (perseroan terbatas), modal terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang disebutkan didalam Akta

Pendirian atau perubahannya. Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00. Dari modal dasar tersebut minimal 25% atau sebesar Rp12.500.000,- harus sudah ditempatkan dan disetor oleh Para Pendiri Perseroan selaku Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 32 dan 33 tentang Modal dan Saham.

Pada perusahaan berbentuk PT sumber modal dapat bersumber dari swasta (individu, badan usaha), dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, warga negara asing, badan usaha asing atau pemerintah asing yang serta merta menjadi pemilik modal. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui mana yang menjadi potensi pajak dalam bentuk usaha tersebut. Sifat dasar bentuk usaha PT adalah memisahkan kekayaan perusahaan dengan pemilik, sehingga terdapat potensi pembebanan pajak berganda ditiap pihak yang menerima penghasilan, dimana penghasilan yang diperoleh akan terkena PPh pasal 25 atau PPh pasal 29, bagian keuntungan (dividen) yang dibagikan ke pemilik juga dikenai pajak PPh pasal 23 atau PPh Final Pasal 4 ayat 2, serta gaji manajemen juga dikenakan pajak PPh pasal 21.

Dalam menentukan penghasilan netto fiskal, pada PT boleh membebankan biaya gaji sebagai pengurang laba kotor (bruto). Terkait modal, jika modal yang dimiliki sebuah perusahaan bersumber dari pinjaman pihak ketiga (badan usaha lain atau persorangan yang bukan pemegang saham) yang mengakibatkan munculnya kewajiban membayar bunga, maka biaya dari bunga tersebut dapat dibebankan sebagai biaya pengurang laba kotor (bruto), namun perlu diperhatikan penjelasan Ps 4 (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang modal, apabila modal berasal

dari pemegang saham yang sebelumnya telah memberikan penuh sahamnya, maka modal yang diberikan tersebut dikatakan sebagai pinjaman dari pemegang saham.

Jika biaya bunga yang dibayarkan PT kepada pemegang saham melebihi standar kewajaran bunga yang berlaku dipasar maka selisih lebihnya akan diperlakukan sebagai dividen yang nantinya dikenakan PPh Pasal 23 dan tidak mengurangi laba kotor (bruto). Dalam hal ini PT memiliki sumber penghasilan berupa dividen atas penyertaan modalnya atau *capital gain* kepada badan usaha atau perusahaan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia maka keuntungan tersebut bukan termasuk Objek Pajak Penghasilan selama nilai penyertaan modal yang diberikan kepada badan usaha tersebut minimal 25% dari nilai modal yang disetorkan ke perusahaan. Hal ini ditetapkan pada Pasal 4 (3) UU no. 36 Tahun 2008.

Pada perusahaan berbentuk CV (*Commanditaire Vennootschap*), perusahaan tidak memiliki modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor yang disebutkan didalam akta pendirian atau perubahannya yang berarti bahwa tidak ada kepemilikan saham di dalam perusahaan. Besarnya penyeteran modal ditentukan dan dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri. Pada perusahaan berbentuk CV seratus persen modal bersumber dari dalam negeri dan pemilik modal adalah warga negara Indonesia.

Aspek dasar perpajakan CV lebih sederhana daripada PT, sebab CV merupakan pengembangan usaha kemitraan atau perseorangan. CV bukan merupakan badan hukum, kekayaan atau aset suatu CV merujuk pada aset atau kekayaan yang dimiliki pendirinya. Laba atas CV yang diterima saat akhir tahun hanya dikenai pajak satu kali saja PPh Pasal 25 atau PPh Pasal 29. Sementara atas

bagian laba yang diterima oleh pemilik CV tidak dikenai pajak dan termasuk dalam non objek PPh sebagaimana telah ditetapkan di Pasal 4 ayat (3) huruf i UU Nomor 36 Tahun 2008.

Penghasilan yang diterima oleh manajemen sebuah CV tidak dianggap sebuah gaji, karena secara hukum manajemen tidak menerima gaji dari CV namun hanya berupa bagian laba, sehingga gaji yang dibayarkan pada manajemen sebuah CV tidak boleh dibebankan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang bunyinya “Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.” Dalam hal CV menerima dividen (keuntungan) atau bagian laba dari dana yang ditanamkan di Indonesia, maka penghasilan yang berupa dividen atau bagian laba tersebut akan dikenai PPh Final Pasal 4 ayat 2 yakni pemotongan sebesar 10% (PP No. 19 Tahun 2009 dan PMK-110/PMK.03/2010) tanpa memandang porsi penyertaanya.

#### **4.5. Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK 70 pada PT.X dan CV.Y**

Program pengampunan pajak yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan yang berlaku sejak disahkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2016 yaitu 1 Juni 2016 hingga 31 Maret 2017. Hal ini dimanfaatkan oleh PT.X dan CV.Y untuk mengikuti program tersebut. Saat perusahaan mengikuti Pengampunan Pajak, itu berarti PT.X dan CV.Y

mendeklarasikan harta perusahaan tersebut dan mengakuinya juga di dalam laporan keuangan perusahaan. Deklarasi harta berarti mengakui kepemilikan atas seluruh harta yang sebelumnya disembunyikan atau tidak dilaporkan dalam laporan perpajakan. Ketika tidak melaporkan harta tersebut dalam laporan perpajakan, umumnya juga tidak mengakuinya dalam laporan keuangan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan dokumen yang wajib dilampirkan dengan laporan SPT Tahunan PPh Badan 1771. Ketika mendeklarasikan harta, perusahaan juga akan mengakuinya dalam sistem akuntansi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlakuan akuntansi untuk kedua perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Perbedaan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK Nomor 70

No.	Perlakuan Akuntansi	PT.X	CV.Y
1.	Pengakuan	Mengakui adanya harta berupa Tanah dan/atau Bangunan Tempat yang di laporkan untuk <i>tax amnesty</i> .	Mengakui adanya harta berupa Piutang yang dilaporkan untuk <i>tax amnesty</i> .
2.	Pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai harta yang dilaporkan sebesar Rp 5.024.000.000,-.</li> <li>- PT.X mengikuti program Pengampunan Pajak saat periode pertama berlangsung sehingga dikenakan tarif 2%. Perhitungan Uang Tebusan:  <math display="block">2\% \times \text{Rp } 5.024.000.000</math> <math display="block">= \text{Rp } 100.480.000,-.</math> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai harta yang dilaporkan sebesar Rp 2.384.123.184,-.</li> <li>- CV.Y mengikuti program Pengampunan Pajak saat periode pertama berlangsung sehingga dikenakan tarif 2%. Perhitungan Uang Tebusan:  <math display="block">2\% \times \text{Rp } 2.384.123.184</math> <math display="block">= \text{Rp } 47.682.464,-</math> </li> </ul>

3.	Penyajian	<p>Aset pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset lainnya dalam laporan keuangan. Selisih aset pengampunan pajak pada PT.X dicatat dalam “saldo laba ditahan”. Dalam hal ini PT.X mencatat jurnal :</p> <p>Beban uang tebusan (D) sebesar Rp 100.480.000,-, dan Kas (K) sebesar Rp 100.480.000,-</p> <p>Pada PT.X, harta berupa tanah dan/atau bangunan yang disajikan dalam laporan keuangan masih hasil dari tax amnesty, hal ini disebabkan karena PT.X belum melakukan revaluasi atas harta tersebut.</p>	<p>CV.Y mencatat jurnal : Beban uang tebusan (D) sebesar Rp 47.682.464,-, dan Kas (K) sebesar Rp 47.682.464,-</p> <p>Saat perusahaan mencatat piutang usaha/dagang yang di <i>tax amnesty</i>-kan, di laporan keuangan akan tetap dicatat sebagai piutang usaha/dagang sampai piutang tersebut dilunasi. Saat piutang usaha/dagang tersebut dilunasi, barulah piutang tersebut akan dihapus dengan piutang yang di <i>tax amnesty</i>-kan atau berkurang jika sudah dibayar sebagian. Karena piutang merupakan <i>current asset</i>, maka angka yang dilaporkan belum tentu sama dengan angka yang dicantumkan, sehingga harus selalu di cek dengan mutasi pergerakan piutang tersebut. Selisih aset pengampunan pajak pada CV.Y dicatat dalam “tambahan modal disetor”.</p>
4.	Pengungkapan	<p>PT.X mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak tgl 28 September 2016, dan menyatakan kesanggupan untuk tidak mengalihkan harta dan menginvestasikan harta yang telah berada di dalam negeri ke luar negeri.</p>	<p>CV.Y mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak tgl 23 September 2016, dan menyatakan kesanggupan untuk tidak mengalihkan harta dan menginvestasikan harta yang telah berada di dalam negeri ke luar negeri.</p>



		Berdasarkan Surat Keterangan tersebut diketahui bahwa jumlah aset yang diakui sebagai aset pengampunan pajak adalah sebesar Rp 5.024.000.000,-.	Berdasarkan Surat Keterangan tersebut diketahui bahwa jumlah aset yang diakui sebagai aset pengampunan pajak adalah sebesar Rp 2.384.123.184,-.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, PSAK Nomor 70 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan pada saat perusahaan mengikuti pengampunan pajak, sehingga hanya berlaku untuk akun-akun tertentu saja yang menjadi aset dan liabilitas pengampunan pajak. Dalam penyusunan laporan keuangan PT.X dan CV.Y menurut PSAK Nomor 70 ada beberapa perbedaan. Perbedaan disebabkan karena adanya perbedaan jenis perusahaan yang mempengaruhi modal perusahaan tersebut, dan juga perbedaan harta yang dilaporkan oleh kedua perusahaan saat mengikuti *tax amnesty*. Dengan adanya *tax amnesty* ini memiliki dampak yang material bagi kedua perusahaan, karena mempengaruhi modal saham perusahaan dan dalam sistem administrasi perusahaan diwajibkan melaporkan harta *tax amnesty* dalam Surat Keterangan setiap tahun sampai batas waktu 3 tahun, sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-20/PJ/2017 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai “Penerapan Psak No.70 Tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak Pada Laporan Keuangan Perusahaan (Studi kasus pada PT. X dan CV. Y)”, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *tax amnesty* bagi PT.X dan CV.Y sangat berguna bagi kedua perusahaan tersebut, karena dengan adanya *tax amnesty* membantu kedua perusahaan untuk meringankan utang pajak atas aset yang berada di luar negeri dan/atau dalam negeri yang belum pernah dilaporkan, dan menghapuskan sanksi administrasi yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan, sehingga kedua perusahaan hanya perlu membayar uang tebusan sebesar 2% dari harta yang dilaporkan dalam *tax amnesty*.

PT.X melaporkan harta yang diikutsertakan dalam *tax amnesty* berupa Tanah dan/atau Bangunan, sedangkan CV.Y melaporkan harta yang diikutsertakan dalam *tax amnesty* berupa piutang. Sebagai perusahaan yang mengikuti *tax amnesty*, PT.X dan CV.Y menerapkan PSAK No.70 dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, dan hasil dari *tax amnesty* tersebut sudah dilaporkan dalam laporan keuangan, sehingga di laporan keuangan PT.X muncul akun baru yaitu ‘saldo laba ditahan’, dan di CV.Y muncul akun ‘tambahan modal disetor’. Perbedaan pencatatan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan jenis perusahaan yang mempengaruhi modal perusahaan dan

juga perbedaan harta yang dilaporkan oleh kedua perusahaan saat mengikuti *tax amnesty*. Dengan adanya *tax amnesty* ini juga memiliki dampak dalam sistem administrasi yaitu perusahaan diwajibkan melaporkan harta *tax amnesty* dalam Surat Keterangan setiap tahun sampai batas waktu 3 tahun, sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-20/PJ/2017 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti. Penelitian ini tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara, sehingga kecenderungan bias masih ada. Oleh karena itu, untuk mengurangi bias maka peneliti melakukan triangulasi teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

## 1.3 Saran

Penelitian selanjutnya sebaiknya meningkatkan ketelitian dengan baik dalam kelengkapan data penelitian, dan memperbanyak pengetahuan tentang teknik pengumpulan data sehingga hasil analisis data yang dihasilkan dapat teruji secara relevan, rinci, dan tidak bias.